

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DPUPKP

Langgeng Raharjo *)

Sebuah organisasi dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Dalam prakteknya sebuah organisasi biasanya menetapkan target tujuan yang akan dicapai untuk jangka waktu tertentu. Target ini berupa suatu keluaran tertentu, bisa berupa terwujudnya suatu barang tertentu dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan, bisa juga target tersebut adalah terwujudnya suatu situasi yang diinginkan yang lebih baik dari yang sudah ada, bisa juga berupa suatu jasa layanan yang baik. Tingkat pencapaian target organisasi ini lebih sering disebut dengan kinerja. Untuk mencapai target yang maksimal maka kinerja ini perlu dilakukan penilaian atau evaluasi secara periodik sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan.

DPUPKP adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman (Perda 14 tahun 2016 pasal 2). Struktur organisasi DPUPKP terdiri dari: kepala dinas, sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air, bidang perumahan dan kawasan permukiman, UPTD kebersihan dan pertamanan, dan UPTD laboratorium konstruksi dan peralatan (Perbup 54 tahun 2016, Perbup 80 tahun 2016, dan Perbup 81 tahun 2016).

Penilaian kinerja

Kinerja adalah suatu hasil kerja dari sebuah organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Indikator penilaian kinerja ditetapkan tergantung dari tujuan organisasi tersebut, dan hasilnya bisa diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kinerja pelaksanaan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) pada umumnya diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu: (1) indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan; dan (2) indikator penyerapan anggaran. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo ditambah dengan satu indikator tambahan yaitu pelaporan.

Pada setiap awal tahun anggaran semua OPD wajib menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) dan rencana anggaran kas. ROPK dan rencana anggaran kas ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Nilai kinerja diperoleh dengan membandingkan capaian realisasi pelaksanaan kegiatan (baik fisik maupun keuangan) dengan rencana. Ada 3 kategori hasil penilaian, yaitu sebagai berikut:

- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai lebih dari 95% dikategorikan “baik”.

- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 90% - 95% dikategorikan “hati-hati”.
- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai kurang dari 90% dikategorikan “buruk”.

Pemberian nilai kinerja dengan kategori baik, hati-hati, dan buruk ini semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan pengendalian, sehingga setiap pelaksana kegiatan wajib mengevaluasi kegiatannya masing-masing setiap periode waktu tertentu (tergantung tingkat unit organisasi yang berkepentingan). Di tingkat pemerintah daerah diperlukan evaluasi kinerja sekurang-kurangnya satu triwulan satu kali, namun di tingkat OPD periode evaluasi ini diperlukan dengan rentang waktu yang lebih pendek (misalnya satu bulan satu kali), dan di tingkat bidang atau seksi (baca: tingkat program atau kegiatan) periode waktu evaluasinya bisa lebih pendek lagi (misalnya satu minggu satu kali).

Sebuah organisasi yang mempunyai unit organisasi lebih dari satu diperlukan ada penilaian terhadap capaian kinerjanya masing-masing untuk dilakukan perbandingan capaian kinerja, sehingga bisa diketahui unit kerja yang kritis dan memerlukan perhatian. Penilaian ranking ini didasarkan pada prosentase capaian kinerja dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Kemudian hasil penilaian secara kuantitatif tersebut diberikan penilaian secara kualitatif. Berikut adalah penilaian kinerja untuk memberikan ranking terhadap unit-unit organisasi.

- Nilai kinerja 90 - 100 dengan predikat/status nilai “sangat tinggi”.
- Nilai kinerja 75 - 90 dengan predikat/status nilai “tinggi”.
- Nilai kinerja 65 – 75 dengan predikat/status nilai “sedang”.
- Nilai kinerja 50 – 65 dengan predikat/status nilai “rendah”.
- Nilai kinerja kurang dari 50 dengan predikat/status nilai “sangat rendah”.

Indikator tambahan berupa pelaporan dianggap cukup penting karena pelaporan ini merupakan sumber informasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk mengetahui upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penilaian kinerja pelaporan ini didasarkan pada tingkat pemahaman pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatannya. Setiap pelaksana kegiatan yang memahami kegiatannya akan tahu persis terhadap permasalahannya dan juga akan mampu mengambil sikap untuk menindak lanjuti mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya penilaian kinerja pelaporan ini didasarkan pada bobot pengisian permasalahan yang berkorelasi dengan pencapaian kinerja fisik dan keuangan serta langkah tindak lanjut yang

dilakukan. Tambahan indikator pelaporan ini semata-mata hanya untuk penilaian perangkungan kinerja unit-unit organisasi yang ada.

Terdapat 3 (tiga) indikator penilaian kinerja, yaitu: indikator kinerja fisik, indikator kinerja keuangan, dan indikator kinerja pelaporan. Masing-masing diberikan bobot yang berbeda, yaitu 40% untuk indikator kinerja fisik, 40% untuk kinerja keuangan, dan 20% untuk kinerja pelaporan. Selanjutnya hasil penilaian kinerja dijumlahkan sebagai nilai kinerja yang dicapai.

Program dan kegiatan di DPUPKP

Program dan kegiatan yang ada di DPUPKP pada tahun 2019 terdapat 11 program dan 38 kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan yang ada di DPUPKP:

No	Program/Kegiatan
1	2
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
2	Penyediaan Jasa Keuangan
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
4	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
5	Penyusunan Laporan Keuangan
6	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
III	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
IV	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten
10	Peningkatan Jalan Kabupaten
11	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
12	Pembangunan Jalan Kabupaten
13	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten
14	Pembangunan Jembatan Kabupaten
15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
V	Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman
16	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.
VA	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
16a	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.
VI	Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat
17	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman
18	Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas
19	Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
20	Pengujian Laboratorium
21	Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat

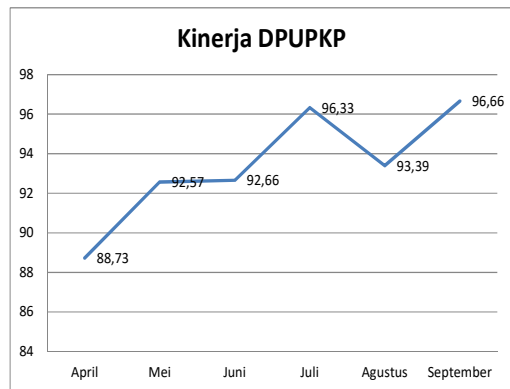
VIII	<i>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air</i>
22	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
23	Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
24	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
26	Pengelolaan Jaringan Irigasi
27	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
28	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi
IX	<i>Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan Perkantoran</i>
29	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
31	Pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB)
32	Pembinaan Jasa Konstruksi
X	<i>Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi</i>
33	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar
34	Penyediaan Sarana Air Bersih
XI	<i>Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan</i>
35	Pemeliharaan Kebersihan Kota
36	Pengelolaan Persampahan
37	Pembangunan dan Pengelolaan Taman
38	Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kinerja DPUPKP

DPUPKP melakukan evaluasi (secara internal) terhadap seluruh kegiatan yang ada, yaitu sebanyak 11 program dan 38 kegiatan. Dalam melakukan evaluasi dengan menerapkan 3 indikator, yaitu: indikator fisik, indikator keuangan, dan indikator pelaporan. Dipakainya 3 indikator ini merujuk pada metode evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara periodik 3 bulan sekali (triwulanan).

Muatan substansi pelaksanaan evaluasi yang dilakukan, meliputi: (1) melakukan evaluasi masing-masing kegiatan (skoring masing-masing kegiatan); (2) perangkingan terhadap seluruh kegiatan (untuk mengetahui kegiatan yang perlu perhatian khusus); (3) penilaian kinerja dinas, yaitu rata-rata dari nilai kinerja seluruh kegiatan. Berikut adalah statistik hasil evaluasi kinerja DPUPKP tahun 2019 (April-September):

No	Bulan	Nilai kinerja	
		Skore	Status
1	Januari	-	tidak dievaluasi
2	Pebruari	-	tidak dievaluasi
3	Maret	-	tidak dievaluasi
4	April	88,73	tinggi
5	Mei	92,57	sangat tinggi
6	Juni	92,66	sangat tinggi
7	Juli	96,33	sangat tinggi
8	Agustus	93,39	sangat tinggi
9	September	96,66	sangat tinggi
10	Oktober		
12	Nopember		
13	Desember		



Dari statistik hasil evaluasi kinerja DPUPKP dapat diketahui bahwa dari bulan April sampai dengan September meningkat dari 88,73 (tinggi) menjadi 96,66 (sangat tinggi). Dengan demikian kinerja DPUPKP secara umum menunjukkan adanya tren yang membaik/meningkat. Namun demikian jika dicermati per bulannya, ada kinerja yang menurun di bulan Agustus dari 96,33 menjadi 93,39 walaupun penurunan ini masih dalam ring interval sangat tinggi (>90).

Kegiatan yang memerlukan perhatian khusus

Kegiatan evaluasi yang terpenting adalah jika hasil evaluasi tersebut mampu untuk memberikan rekomendasi demi perbaikan kinerja untuk periode waktu berikutnya. Untuk mengetahui kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang kinerjanya belum baik (buruk atau hati-hati), terutama untuk periode waktu (bulan) terakhir. Tabel berikut menunjukkan hasil evaluasi kinerja kegiatan DPUPKP pada bulan terakhir (September).

No	Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Deviasi		Kinerja kegiatan					
		Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (40%)	Keu (40%)	Lap (20%)	Total (100%)	Status	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	77,00	73,73	76,00	73,05	-1,30	-0,92	39,48	39,63	20,00	99,11	sangat tinggi	
2	Penyediaan Jasa Keuangan	75,00	66,92	75,00	64,69	0,00	-3,33	40,00	38,67	20,00	98,67	sangat tinggi	
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	71,00	62,60	71,00	62,18	0,00	-0,68	40,00	39,73	20,00	99,73	sangat tinggi	
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja												
4	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	78,00	82,03	98,00	72,98	25,64	-11,03	40,00	35,59	20,00	95,59	sangat tinggi	
5	Penyusunan Laporan Keuangan	65,00	70,85	65,00	70,83	0,00	-0,03	40,00	39,99	20,00	99,99	sangat tinggi	
6	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	84,02	78,60	84,02	78,60	0,00	-0,01	40,00	40,00	20,00	100,00	sangat tinggi	
III	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD												
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	-								
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	77,95	63,16	77,75	63,15	-0,26	-0,01	39,90	40,00	20,00	99,89	sangat tinggi	
IV	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan												
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	93,00	60,65	94,00	56,68	1,08	-6,55	40,00	37,38	20,00	97,38	sangat tinggi	

10	Peningkatan Jalan Kabupaten	82,00	50,70	86,00	50,60	4,88	-0,21	40,00	39,92	20,00	99,92	sangat tinggi
11	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	75,00	82,63	81,00	78,24	8,00	-5,31	40,00	37,88	20,00	97,88	sangat tinggi
12	Pembangunan Jalan Kabupaten	96,00	20,99	97,00	20,85	1,04	-0,68	40,00	39,73	20,00	99,73	sangat tinggi
13	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	75,00	82,67	84,00	80,36	12,00	-2,79	40,00	38,88	20,00	98,88	sangat tinggi
14	Pembangunan Jembatan Kabupaten	96,00	36,43	90,00	34,58	-6,25	-5,07	37,50	37,97	20,00	95,47	sangat tinggi
15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	96,00	29,93	97,00	29,44	1,04	-1,64	40,00	39,35	20,00	99,35	sangat tinggi
V	Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman											
16	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.		-									
Va	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya											
16a	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	65,00	58,98	51,00	22,74	-21,54	-61,45	31,38	15,42	20,00	66,80	sedang
VI	Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat											
17	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman	59,00	37,15	64,00	30,02	8,47	-19,20	40,00	32,32	20,00	92,32	sangat tinggi
18	Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas	75,00	74,12	75,00	67,45	0,00	-8,99	40,00	36,40	20,00	96,40	sangat tinggi
19	Pembangunan Fasilitas Lingkungan Rusunawa	81,00	62,31	95,00	60,18	17,28	-3,42	40,00	38,63	20,00	98,63	sangat tinggi
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan											
20	Pengujian Laboratorium	66,00	69,84	66,00	67,46	0,00	-3,41	40,00	38,63	20,00	98,63	sangat tinggi
21	Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat	85,00	85,74	85,00	85,66	0,00	-0,10	40,00	39,96	20,00	99,96	sangat tinggi
VIII	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air											
22	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	34,00	15,74	34,00	15,61	0,00	-0,78	40,00	39,69	20,00	99,69	sangat tinggi
23	Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	95,00	61,06	95,00	58,15	0,00	-4,77	40,00	38,09	20,00	98,09	sangat tinggi
24	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	76,00	75,52	76,00	73,21	0,00	-3,06	40,00	38,78	20,00	98,78	sangat tinggi
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	77,00	65,05	77,00	64,03	0,00	-1,58	40,00	39,37	20,00	99,37	sangat tinggi
26	Pengelolaan Jaringan Irigasi	46,00	66,46	49,00	66,13	6,52	-0,49	40,00	39,80	20,00	99,80	sangat tinggi
27	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	97,00	97,25	97,00	96,62	0,00	-0,64	40,00	39,74	20,00	99,74	sangat tinggi
28	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi	100,00	53,37	100,00	53,37	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	100,00	sangat tinggi
IX	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan Perkantoran											
29	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93,00	101,59	80,00	54,05	-13,98	-46,79	34,41	21,28	20,00	75,69	tinggi
30	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	95,00	106,33	85,00	56,31	-10,53	-47,04	35,79	21,18	20,00	76,97	tinggi
31	Pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan bangunan (IMB)	75,00	78,68	75,00	77,07	0,00	-2,04	40,00	39,18	20,00	99,18	sangat tinggi
32	Pembinaan Jasa Konstruksi	95,00	100,00	97,00	97,77	2,11	-2,23	40,00	39,11	20,00	99,11	sangat tinggi
X	Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											
33	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar	97,00	98,66	97,00	93,71	0,00	-5,01	40,00	38,00	20,00	98,00	sangat tinggi
34	Penyediaan Sarana Air Bersih	100,00	66,85	100,00	66,18	0,00	-1,00	40,00	39,60	20,00	99,60	sangat tinggi
XI	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan											
35	Pemeliharaan Kebersihan Kota	78,00	79,22	78,00	78,56	0,00	-0,83	40,00	39,67	20,00	99,67	sangat tinggi
36	Pengelolaan Persampahan	82,00	59,71	82,00	59,25	0,00	-0,77	40,00	39,69	20,00	99,69	sangat tinggi
37	Pembangunan dan Pengelolaan Taman	83,00	95,47	83,00	94,17	0,00	-1,37	40,00	39,45	20,00	99,45	sangat tinggi
38	Pengelolaan Air Limbah Domestik	75,00	80,20	75,00	78,90	0,00	-1,63	40,00	39,35	20,00	99,35	sangat tinggi
	Jumlah	78,16	57,90	78,73	54,90	0,73	-5,19	39,42	37,24	20,00	96,66	sangat tinggi

Dari table tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deviasi (%) baik fisik maupun keuangan merupakan deviasi antara realisasi dan target. Kinerja kegiatan yang baik adalah jika deviasi keterlambatan (-) fisik

dan/atau keuangan tersebut lebih rendah dari 5%. Jika deviasi keterlambatannya antara 5% -10% maka harus hati-hati, dan memerlukan upaya peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dan jika deviasi keterlambatannya lebih dari 10% maka kegiatan tersebut kinerja pelaksanaannya buruk dan memerlukan perhatian khusus, harus ada upaya-upaya lain (selain yang sudah direncanakan) agar hasil akhir kegiatan target keluarannya bisa tercapai.

2. Kinerja kegiatan diharapkan mendapatkan nilai lebih dari 90 (sangat tinggi).
3. Dengan diketahuinya status kinerja kegiatan maka dapat menjadi petunjuk kegiatan yang memerlukan perhatian untuk bulan berikutnya.

Kesimpulan

1. Kinerja DPUPKP secara umum meningkat dari status tinggi menjadi status sangat tinggi (pada rentang waktu bulan April-September).
2. Masih terdapat kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, yaitu kegiatan-kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah 90, dan deviasi realisasi fisik dan/atau keuangan terhadap targetnya (target bulanan) lebih dari 5%.

Daftar pustaka

1. Peraturan Daerah Nomer 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomer 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
3. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
4. Peraturan Bupati Nomer 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Peraturan Bupati Nomer 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
6. Peraturan Bupati Nomer 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
7. Peraturan Bupati Nomer 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

8. Peraturan Bupati Nomer 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
9. MONEVKU 2.0 BAPPEDA (aplikasi).
10. Simd@ 2019 (aplikasi).

*) Ir. Langgeng Raharjo, MT. adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.